

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan tentang catatan transaksi keuangan di suatu perusahaan, yaitu seluruh kegiatan transaksi yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan seperti transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan dibuat untuk menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas perusahaan atau sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menemukan solusi yang benar apabila perusahaan mengalami masalah.

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan dan materi penjelasan lainnya yang masih termasuk integral dari laporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun para penggunanya adalah investor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. UMKM memiliki arti usaha atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Adapun usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Walau dikatakan atau sering disebut usaha mikro jika diartikan usaha kecil, jenis bisnis ini sebagai roda penggerak perekonomian yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat.

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ("PP 7/2021") Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut PP 7/2021 (Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), kriteria UMKM yaitu:

a) Kewirausahaan Mikro

- 1) Mempunyai harta dan kemampuan netto maksimal Rp 1.000.000.000 belum mencakup tanah dan bangunan untuk usaha;
- 2) atau menghasilkan peredaran usaha tahunan maksimal Rp 2.000.000.000.

- b) Kewirausahaan Kecil
 - 1) Mempunyai harta dan kemampuan netto melebihi Rp 1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 belum mencakup tanah dan bangunan untuk usaha; atau
 - 2) Menghasilkan peredaran usaha tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000.
- c) Kewirausahaan Menengah
 - 1) Mempunyai harta dan kemampuan netto lebih dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Menghasilkan peredaran usaha tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk para pelaku UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk membantu UMKM dapat mengetahui kondisi bisnisnya dan dapat mengembangkan usahanya di masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki bisnis tersebut. Selain itu laporan keuangan juga bisa digunakan oleh para pelaku UMKM untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit kepada Lembaga keuangan, selama ini yang menjadi penghambat para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari berbagai Lembaga keuangan adalah karena tidak memiliki laporan keuangan.

SAK EMKM dapat lebih mudah diterapkan dibandingkan standar akuntansi lainnya, hal ini dikarenakan bentuk yang sederhana dan hanya mengatur transaksi umum atau transaksi yang biasanya dilakukan oleh UMKM, dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi para pengguna eksternalnya.

Bentuknya yang sederhana dikarenakan DSAK IAI berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan para pelaku UMKM akan adanya laporan keuangan agar bisa mendapatkan akses pendanaan yang lebih luas ke Lembaga keuangan, tetapi juga menyadari adanya kebutuhan lain seperti standar akuntansi yang lebih sederhana karena standar akuntansi yang sebelumnya diterbitkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dinilai cukup sulit untuk diterapkan oleh para pelaku UMKM pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memahami akuntansi.

Karena adanya standar akuntansi yang sederhana ini dapat diharapkan membantu para pelaku UMKM untuk Menyusun laporan keuangannya secara mandiri. Jika hal tersebut dapat diterapkan oleh pelaku UMKM dengan baik maka tujuan pengembangan UMKM agar lebih maju, mandiri, serta modern dapat terpenuhi. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dibentuk untuk membantu dan mempermudah para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang sudah ditetapkan pada UMKM berguna untuk mewujudkan dan mengembangkan UMKM yang mandiri serta dapat membantu dalam hal pendanaan baik yang didapatkan dari pemerintah maupun perbankan. Berikut penjelasan tentang kebijakan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

2.4 Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam SAK EMKM dilakukan pada setiap elemen yang menyusun laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Sedangkan liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitasnya pada harga transaksi, dan dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut. Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (FIFO) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Jumlah

persediaan yang mengalami penurunan dan/atau kerugian diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan dan/atau kerugian tersebut.

3. Investasi pada Ventura Bersama

Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

4. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya, dan diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode. Entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas, serta biaya dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengukuran awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tanah diukur pada biaya perolehan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya.

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

5. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan dari entitas, dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas dari hak tersebut dapat atau tidak dialihkan atau dipisahkan dari entitas. Entitas mengakui aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tak berwujud meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan dari hak tersebut dapat atau tidak dialihkan atau dipisahkan dari entitas. Entitas mengakui aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya.

Biaya perolehan aset tak berwujud meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang serupa tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Entitas mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual atau hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hal lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset takberwujud harus termasuk periode pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang signifikan. Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset takberwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi aset takberwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).

6. Liabilitas Dan Ekuitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontinjensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontinjensi jika material. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai aset. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan/atau aset nonkas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Untuk usaha berbadan hukum yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk bahan usaha tersebut.

7. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengaku penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka. Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha.

Entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah tagihan. Entitas mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. Entitas mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak. Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Keuntungan tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset tersebut di jual.

Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk hibah atau bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Dalam hal penerimaan hibah secara substansi merupakan bagian dari kontribusi modal dari pemilik, maka entitas mengakui hibah tersebut diluar laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Hibah di dalamnya termasuk hibah aset nonmoneter seperti tanah atau sumber daya lain, tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima.

Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan

laba rugi pada periode terjadinya. Dalam kondisi jumlah arus kas keluar tidak dapat diukur dengan andal dan/atau waktu pengeluaran arus kasnya tidak dapat dipastikan maka beban diakui pada saat kas dibayarkan.

8. Pajak Penghasilan

Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan.

9. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing, meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang di denominasi dalam mata uang asing, memperoleh atau melepas aset, atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK EMKM.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya, maka menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank
- g. Ekuitas

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Contoh laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM lihat pada gambar 2.1

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas menyajikan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan

- b. Beban keuangan
- c. Beban pajak

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Contoh laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM lihat pada gambar 2.2

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan, informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan yaitu:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM lihat pada gambar 2.3.

Contoh Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan SAK EMKM
Gambar 2.1. Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang usaha			
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan			
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka			
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap			
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
<i>JUMLAH ASET</i>		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank			
Utang bank	8	xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)			
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS</i>		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

Gambar 2.2. Laporan Laba Rugi

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

Gambar 2.3. Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8		
1. UMUM	<p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p>	
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING		
a. Pernyataan Kepatuhan	<p>Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	
b. Dasar Penyusunan	<p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p>	
c. Piutang Usaha	<p>Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p>	
d. Persediaan	<p>Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p>	
e. Aset Tetap	<p>Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p>	
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban	<p>Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.</p>	
g. Pajak Penghasilan	<p>Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p>	
3. KAS	20X8	20X7
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx

**ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8**

4. GIRO

	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku bunga – Rupiah	4,50%	5,00%

6. PIUTANG USAHA

	20X8	20X7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	20X8	20X7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20X8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

**ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8**

10. PENDAPATAN PENJUALAN

	20X8	20X7
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

11. BEBAN LAIN-LAIN

	20X8	20X7
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	20X8	20X7
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebagai referensi bagi penulis untuk dapat memahami agar memperluas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan memperoleh solusi yang baru.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Rizki Asrinda Handayani (2018)	ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KAB. LUWU UTARA (STUDI KASUS UMKM FARHAN CAKE'S)	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus	UMKM Farhan Cake"s hendaknya melakukan pencatatan atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM untuk mengolah keuangan perusahaan supaya dapat mengetahui kinerja dan posisi keuangan usaha dengan lebih akurat dan di jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi perusahaan serta pelaku UMKM juga dapat membedakan harta pribadi dan harta hasil usaha yang di rintisnya .
2	Canda Dikana (2019)	PENERAPAN SAK EMKM PADA PELAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA CALISTA MUSIC ACADEMY PALEMBANG)	Deskriptif kualitatif	Pemilik menyadari untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan usahanya agar lebih maju seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan modal kerja yang dimiliki saat ini melainkan mencari bantuan dari luar, misalnya mengajukan permohonan kredit usaha kepada perbankan. Regulasi pemberian kredit usaha oleh perbankan saat ini memberikan persyaratan salah satunya pemohon harus melampirkan laporan keuangan usahanya sesuai standar yang berlaku. Bagi Calista Music Academy laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan peraturan SAK EMKM.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
3	Salma Rizky Puri Ariztanti (2021)	ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM BY COFFEE	Deskriptif	Dalam penelitian Rachmanti, dkk (2019) dan Yuliyani (2019) tentang penerapan SAK EMKM pada UMKM, menunjukkan bahwa tidak adanya laporan keuangan yang dibuat pada UMKM tersebut. UMKM dianggap belum mampu untuk mengimplementasikan standar akuntansi yang benar karena kurangnya informasi dan pengetahuan. Dari contoh penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis UMKM masih belum paham dan memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang penyusunan laporan keuangan yang benar. Padahal dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan memudahkan pemilik usaha untuk mengetahui informasi yang sebagai pengambilan keputusan.
4	Niswaton Mujahidah (2021)	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA KECIL MENENGAH CV. ILHAM LESTARI MEDAN	Deskriptif	Penerapan yang dibuat CV. Ilham Lestari Medan Berdasarkan SAK EMKM yaitu pencatatan yang dilakukan CV. Ilham Lestari sudah sesuai dengan SAK EMKM karena sudah menggunakan teknik basis akrual dan tidak lagi menggunakan teknik basis kas. Dalam penyajian laporan keuangan, CV. Ilham Lestari Medan belum menyusun ketiga laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dari tiga laporan keuangan, CV. Ilham Lestari Medan hanya membuat satu laporan yaitu laporan laba rugi sedangkan laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan belum ada dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi CV. Ilham Lestari Medan.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
5	Atika Sari (2021)	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK-EMKM) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERKAH LAUNDRY	Kualitatif Deskriptif	Penyajian yang dilakukan oleh Berkah Laundry hanya penyajian uang masuk dan uang keluar. Tanpa memperhitungkan akumulasi penyusutan terhadap asset tetap yang dimilikinya. Sedangkan menurut SAK-EMKM harus menyajikan tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. UMKM Berkah Laundry seharusnya melakukan pencatatan berdasarkan siklus akuntansi yang lengkap mulai dari tahap pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAKEMKM dan UMKM Berkah Laundry seharusnya melaksanakan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan SAK-EMKM.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan narasi atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi untuk menentukan kejelasan suatu proses penelitian secara keseluruhan. Maka dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran yang tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran

